
PERAN SEKTOR PUBLIK DALAM MENDORONG PERTUMBUHAN PEREKONOMIAN NASIONAL

¹Siradjuddin, ²Abdul Wahab, ³Radina Fauzi

^{1,2,3}Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

Email: ¹siradjuddin@uin-alauddin.ac.id, ²abdulwahab@uin-alauddin.ac.id,

³radinafauzi@gmail.com

ARTICLE INFO

Kata Kunci:

*Sektor Publik;
Pertumbuhan
Ekonomi; Kebijakan
Fiskal; Tata Kelola;
Pembangunan
Nasional.*

Cara Sitasi:

Siradjuddin, Abdul
Wahab, Radina Fauzi.
"Peran Sektor Publik
dalam Mendorong
Pertumbuhan
Perekonomian
Nasional."

Currency:

Jurnal Keuangan dan
Perbankan Syariah
[Volume 05, Nomor
01](#) Juli 2026

ABSTRACT

Sektor publik berperan strategis sebagai instrumen utama dalam mendorong pertumbuhan ekonomi nasional melalui kebijakan fiskal, investasi publik, pengelolaan badan usaha milik negara (BUMN), serta berbagai instrumen pembiayaan pembangunan. Meskipun demikian, penelitian terdahulu umumnya masih mengkaji instrumen-instrumen tersebut secara parsial, sehingga kajian yang mengintegrasikan berbagai peran sektor publik dalam satu kerangka analisis masih relatif terbatas. Penelitian ini bertujuan menganalisis mekanisme sektor publik dalam mendorong pertumbuhan ekonomi nasional, mengevaluasi efektivitas pengeluaran pemerintah dan investasi publik, serta mengkaji pengaruh kualitas tata kelola pemerintahan terhadap keberhasilan pembangunan ekonomi. Penelitian menggunakan metode studi kepustakaan (*library research*) dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Data diperoleh dari berbagai jurnal ilmiah nasional dan internasional, buku, regulasi, serta dokumen resmi yang relevan, kemudian dianalisis menggunakan teknik *content analysis* melalui proses reduksi data, kategorisasi, sintesis, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sektor publik berkontribusi signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi melalui pembangunan infrastruktur, peningkatan kualitas pelayanan publik, penguatan peran BUMN, serta optimalisasi instrumen pembiayaan syariah seperti sukuk. Namun, efektivitas berbagai instrumen tersebut sangat dipengaruhi oleh kualitas tata kelola pemerintahan, transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi alokasi anggaran. Penelitian ini memberikan kontribusi dengan menawarkan perspektif yang lebih komprehensif mengenai integrasi berbagai instrumen sektor publik dalam mendorong pertumbuhan ekonomi nasional. Implikasi penelitian menegaskan bahwa penguatan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) merupakan prasyarat utama untuk mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif, berkelanjutan, dan berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.

The public sector plays a strategic role as a key instrument in promoting national economic growth through fiscal policy, public investment, the management of state-owned enterprises (SOEs), and various development financing instruments. However, previous studies have generally examined these instruments separately, leaving limited research that integrates the diverse roles of the public sector within a comprehensive analytical framework. This study aims to analyze the mechanisms through which the public sector promotes national economic growth, evaluate the effectiveness of government expenditure and public investment, and examine the influence of governance quality on the success of economic development. This research employs a library research method using a qualitative descriptive approach. Data were collected from national and international scholarly journals, books, government regulations, and other relevant official documents, and were analyzed using content analysis through data reduction, categorization, synthesis, and conclusion drawing. The findings indicate that the public sector makes a significant contribution to economic growth through infrastructure development, improved public service delivery, strengthened roles of state-owned enterprises, and the optimization of Islamic financing instruments such as sukuk. Nevertheless, the effectiveness of these instruments largely depends on the quality of public governance, transparency, accountability, and the efficient allocation of public resources. This study contributes to the literature by offering a more comprehensive perspective on integrating various public sector instruments to foster national economic growth. The findings further imply that strengthening good governance is a fundamental prerequisite for achieving inclusive, sustainable economic growth and improving societal welfare.

Pendahuluan

Sektor publik memiliki peran strategis dalam mendorong pembangunan ekonomi melalui penyediaan barang dan jasa publik, stabilisasi perekonomian, redistribusi pendapatan, serta penciptaan lingkungan yang kondusif bagi aktivitas ekonomi (Muhammad Angka Widjaya & Muhammad Iqbal Fasa, 2025). Dalam perspektif ekonomi publik, pemerintah tidak hanya berfungsi sebagai regulator, tetapi juga sebagai pelaku ekonomi yang berperan dalam mengalokasikan sumber daya, mengoreksi kegagalan pasar (*market failure*), serta menjaga stabilitas makroekonomi melalui kebijakan fiskal, investasi publik, dan pengelolaan badan usaha milik negara (BUMN). Efektivitas pelaksanaan fungsi-fungsi tersebut menjadi salah satu faktor penting yang menentukan keberhasilan pembangunan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat (Anisa et al., 2024).

Di Indonesia, peran sektor publik semakin penting di tengah meningkatnya kompleksitas tantangan pembangunan, seperti perlambatan pertumbuhan ekonomi global, tekanan fiskal, transformasi digital, perubahan iklim, serta meningkatnya tuntutan terhadap

tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel (Setyawan & Purnomo, 2025). Berbagai kebijakan pemerintah, seperti pembangunan infrastruktur, reformasi subsidi, peningkatan kualitas belanja negara, optimalisasi investasi publik, serta pemanfaatan instrumen pembiayaan inovatif, termasuk sukuk negara, menunjukkan komitmen pemerintah dalam mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan (Jannah & Kurniati, 2025). Namun demikian, berbagai permasalahan masih dihadapi, antara lain belum optimalnya penyerapan anggaran, rendahnya efisiensi belanja publik, ketidaktepatan sasaran program subsidi, serta disparitas pembangunan antardaerah. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa besarnya alokasi anggaran belum tentu menghasilkan pertumbuhan ekonomi yang optimal apabila tidak didukung oleh tata kelola pemerintahan yang baik (Putra et al., 2025).

Berbagai penelitian terdahulu telah mengkaji hubungan antara pengeluaran pemerintah, investasi publik, subsidi, pembiayaan pembangunan, maupun tata kelola pemerintahan terhadap pertumbuhan ekonomi. Amri et al. (2023) menemukan bahwa pengeluaran pemerintah memberikan kontribusi positif terhadap pertumbuhan ekonomi regional apabila didukung oleh kapasitas fiskal dan upaya optimalisasi penerimaan pajak. Selanjutnya, Afonso dan Rodrigues (2024) menjelaskan bahwa investasi publik, khususnya pada sektor konstruksi dan penelitian serta pengembangan (*research and development*), berperan dalam meningkatkan produktivitas dan mendorong pertumbuhan ekonomi jangka panjang. Nguyen (2024) menunjukkan bahwa efektivitas belanja publik dalam mendorong investasi swasta sangat dipengaruhi oleh kualitas institusi, sehingga tata kelola pemerintahan menjadi faktor penting dalam menentukan keberhasilan kebijakan fiskal. Temuan tersebut diperkuat oleh Okunlola et al. (2024) yang menyatakan bahwa dampak pengeluaran pemerintah terhadap pertumbuhan ekonomi akan lebih optimal apabila didukung oleh tingkat korupsi yang rendah dan stabilitas kelembagaan yang baik. Selain itu, Sulemana dan Mom (2023) menegaskan bahwa hubungan antara belanja sektor publik dan pertumbuhan ekonomi di negara-negara berkembang sangat dipengaruhi oleh kualitas tata kelola pemerintahan, terutama aspek transparansi, akuntabilitas, dan efektivitas birokrasi. Meskipun demikian, sebagian besar penelitian tersebut masih membahas pengeluaran pemerintah, investasi publik, maupun tata kelola pemerintahan secara terpisah, sehingga belum memberikan gambaran yang komprehensif mengenai sinergi berbagai instrumen sektor publik, seperti pengeluaran pemerintah, investasi publik, pembiayaan pembangunan, kebijakan subsidi, dan tata kelola pemerintahan dalam mendorong pertumbuhan ekonomi nasional. Perbedaan hasil penelitian mengenai efektivitas instrumen-instrumen tersebut juga menunjukkan bahwa keberhasilan kebijakan publik sangat dipengaruhi oleh konteks kelembagaan dan kualitas implementasinya. Oleh karena itu, masih terdapat kesenjangan penelitian (*research gap*) yang memerlukan kajian lebih lanjut melalui pendekatan yang mengintegrasikan berbagai instrumen sektor publik ke dalam satu kerangka analisis yang komprehensif.

Berdasarkan kesenjangan tersebut, penelitian ini menawarkan perspektif yang lebih komprehensif dengan mengintegrasikan berbagai instrumen sektor publik, meliputi kebijakan fiskal, pengeluaran pemerintah, investasi publik, pengelolaan BUMN, pembiayaan syariah melalui sukuk, serta kualitas tata kelola pemerintahan dalam satu kerangka analisis. Pendekatan ini diharapkan mampu memberikan pemahaman yang lebih utuh mengenai bagaimana sinergi berbagai instrumen tersebut berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi nasional. Dengan demikian, kebaruan (*novelty*) penelitian ini terletak pada sintesis berbagai instrumen sektor publik yang selama ini lebih banyak dikaji secara parsial menjadi suatu kerangka analisis yang terintegrasi.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis mekanisme peran sektor publik dalam mendorong pertumbuhan perekonomian nasional, mengevaluasi efektivitas kebijakan fiskal, pengeluaran pemerintah, investasi publik, dan instrumen pembiayaan pembangunan, serta mengkaji pengaruh kualitas tata kelola pemerintahan terhadap keberhasilan pembangunan ekonomi. Penelitian ini menggunakan pendekatan studi kepustakaan (*library research*) dengan menelaah berbagai literatur ilmiah, hasil penelitian empiris, regulasi, dan dokumen resmi yang relevan.

Secara teoretis, penelitian ini diharapkan dapat memperkaya literatur mengenai ekonomi sektor publik dengan menyajikan sintesis yang komprehensif mengenai hubungan antara berbagai instrumen kebijakan publik dan pertumbuhan ekonomi. Secara praktis, hasil penelitian diharapkan menjadi masukan bagi pemerintah dan para pembuat kebijakan dalam merumuskan strategi pengelolaan fiskal, peningkatan kualitas belanja negara, penguatan tata kelola pemerintahan, serta optimalisasi instrumen pembiayaan pembangunan. Dengan demikian, implementasi kebijakan sektor publik diharapkan mampu menghasilkan pertumbuhan ekonomi yang lebih inklusif, berkelanjutan, adaptif terhadap tantangan global, serta berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Kajian Pustaka dan Pengembangan Hipotesis

1. Peran Strategis Sektor Publik dalam Pertumbuhan Ekonomi

Dalam teori ekonomi publik, pemerintah memiliki tiga fungsi utama, yaitu fungsi alokasi, distribusi, dan stabilisasi yang menjadi landasan dalam mendorong pembangunan ekonomi (Putra et al., 2025). Perspektif *Keynesian Theory* menjelaskan bahwa intervensi pemerintah melalui kebijakan fiskal, terutama pengeluaran pemerintah dan investasi publik, mampu meningkatkan permintaan agregat, menciptakan lapangan kerja, serta mempercepat pertumbuhan ekonomi, khususnya ketika mekanisme pasar tidak mampu bekerja secara optimal (Kharisma, 2014). Sementara itu, *Endogenous Growth Theory* menegaskan bahwa investasi pemerintah pada infrastruktur, pendidikan, teknologi, dan inovasi mampu meningkatkan produktivitas jangka panjang sehingga menjadi faktor penting dalam mempertahankan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan (Wijaya, 2021).

Dalam praktiknya, sektor publik tidak hanya berperan sebagai regulator, tetapi juga sebagai pelaku ekonomi melalui pengelolaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN), penyediaan infrastruktur, serta pemberian berbagai layanan publik. Berbagai penelitian empiris menunjukkan bahwa pengeluaran pemerintah memiliki hubungan positif dengan peningkatan produktivitas ekonomi, penciptaan kesempatan kerja, dan pertumbuhan produk domestik bruto apabila dialokasikan secara efektif. Selain itu, kebijakan fiskal yang didukung oleh stabilitas makroekonomi mampu meningkatkan daya saing nasional dan memperkuat ketahanan ekonomi terhadap berbagai guncangan eksternal (Sukma & Furqon, 2025).

Namun demikian, efektivitas intervensi pemerintah tidak hanya ditentukan oleh besarnya pengeluaran negara, tetapi juga oleh kualitas institusi dan kapasitas birokrasi dalam mengelola sumber daya publik. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa peningkatan belanja pemerintah tidak selalu menghasilkan pertumbuhan ekonomi yang optimal apabila dihadapkan pada rendahnya efisiensi anggaran, lemahnya koordinasi antarlembaga, serta praktik tata kelola yang belum akuntabel. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa hubungan antara sektor publik dan pertumbuhan ekonomi bersifat multidimensional serta dipengaruhi oleh berbagai faktor institusional (Sari & Rejekiingsih, 2024).

Berdasarkan berbagai penelitian terdahulu, dapat disimpulkan bahwa sektor publik merupakan instrumen strategis dalam mendorong pertumbuhan ekonomi melalui kebijakan fiskal, investasi publik, dan penyediaan layanan publik. Akan tetapi, efektivitasnya sangat dipengaruhi oleh kualitas tata kelola pemerintahan, kapasitas kelembagaan, serta efisiensi implementasi kebijakan sehingga diperlukan pendekatan yang lebih terintegrasi dalam memahami hubungan antara berbagai instrumen sektor publik dan pertumbuhan ekonomi.

2. Instrumen Kebijakan Publik dan Keberlanjutan Pembangunan

Keberhasilan pembangunan ekonomi tidak hanya ditentukan oleh besarnya intervensi pemerintah, tetapi juga oleh efektivitas berbagai instrumen kebijakan publik yang digunakan (Fitri et al., 2025). Dalam perspektif *Public Finance Theory*, pengeluaran pemerintah diarahkan untuk menciptakan efisiensi ekonomi sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui penyediaan infrastruktur, pelayanan publik, perlindungan sosial, serta penciptaan iklim investasi yang kondusif. Sementara itu, *Good Governance Theory* menekankan bahwa transparansi, akuntabilitas, partisipasi, efektivitas, dan supremasi hukum merupakan prasyarat utama agar kebijakan publik mampu menghasilkan manfaat yang optimal bagi masyarakat (Fitri Nurul Aftitah et al., 2024).

Salah satu instrumen strategis pemerintah adalah investasi melalui Penyertaan Modal Negara (PMN) kepada Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Investasi tersebut berfungsi meningkatkan kapasitas perusahaan negara dalam menyediakan layanan publik, memperluas pembangunan infrastruktur, serta mendukung pertumbuhan sektor-sektor strategis. Selain itu, pemerintah juga mengembangkan berbagai instrumen pembiayaan inovatif, termasuk sukuk negara, sebagai alternatif pembiayaan pembangunan yang tidak hanya memperluas sumber pendanaan, tetapi juga mendukung pengembangan sistem keuangan syariah nasional (Mi'ah et al., 2024).

Di sisi lain, kebijakan subsidi tetap menjadi instrumen penting dalam menjaga daya beli masyarakat dan mengurangi ketimpangan sosial. Namun, berbagai penelitian menunjukkan bahwa efektivitas subsidi sangat bergantung pada ketepatan sasaran, efisiensi distribusi, serta kemampuan pemerintah dalam meminimalkan distorsi pasar. Kebijakan subsidi yang tidak tepat sasaran berpotensi meningkatkan beban fiskal tanpa memberikan dampak yang signifikan terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat. Selain itu, kebijakan publik yang mendukung investasi hijau, riset, dan inovasi juga semakin penting dalam mendorong pembangunan ekonomi yang berkelanjutan di tengah tantangan transformasi digital dan perubahan iklim.

Meskipun berbagai penelitian telah membahas pengeluaran pemerintah, investasi publik, subsidi, pembiayaan syariah, maupun tata kelola pemerintahan, sebagian besar penelitian masih mengkaji instrumen-instrumen tersebut secara terpisah. Sebagai contoh, Maharani dan Widyastuti (2024) lebih berfokus pada kontribusi utang luar negeri, sukuk, dan obligasi terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia, sedangkan Irianti et al. (2024) menganalisis pengaruh penerbitan Sukuk Negara terhadap pembiayaan defisit APBN dan pertumbuhan ekonomi dengan mempertimbangkan likuiditas pasar sebagai variabel moderasi. Di sisi lain, Metoui dan Ghorbel (2023) meneliti pengaruh perkembangan pasar sukuk terhadap pertumbuhan ekonomi di kawasan Timur Tengah dan Asia Tenggara, sementara Novitasari dan Arundina (2023) mengkaji hubungan dinamis antara sukuk dan pertumbuhan ekonomi di Indonesia menggunakan pendekatan *Vector Error Correction Model* (VECM). Selain itu, Apriani et al. (2023) menunjukkan bahwa perkembangan sukuk korporasi dipengaruhi oleh berbagai faktor makroekonomi, seperti inflasi, jumlah uang

beredar, tingkat pengangguran, dan harga minyak dunia. Beragamnya fokus dan hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa efektivitas masing-masing instrumen sektor publik dipengaruhi oleh kondisi kelembagaan, kualitas tata kelola, kapasitas fiskal, serta karakteristik perekonomian setiap negara. Namun demikian, belum banyak penelitian yang mengintegrasikan pengeluaran pemerintah, investasi publik, pembiayaan syariah, kebijakan subsidi, dan tata kelola pemerintahan dalam satu kerangka analisis yang komprehensif untuk menjelaskan mekanisme pertumbuhan ekonomi secara lebih utuh. Oleh karena itu, masih terdapat kesenjangan penelitian (*research gap*) yang membuka peluang untuk mengembangkan kajian yang mengintegrasikan berbagai instrumen sektor publik sebagai determinan pertumbuhan ekonomi nasional yang inklusif dan berkelanjutan.

Berdasarkan sintesis berbagai teori dan penelitian empiris tersebut, dapat disimpulkan bahwa efektivitas sektor publik dalam mendorong pertumbuhan ekonomi tidak hanya ditentukan oleh besarnya pengeluaran pemerintah, tetapi juga oleh kualitas tata kelola, efektivitas investasi publik, inovasi pembiayaan, serta akuntabilitas kebijakan. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan yang mengintegrasikan berbagai instrumen sektor publik agar pembangunan ekonomi dapat berlangsung secara inklusif dan berkelanjutan.

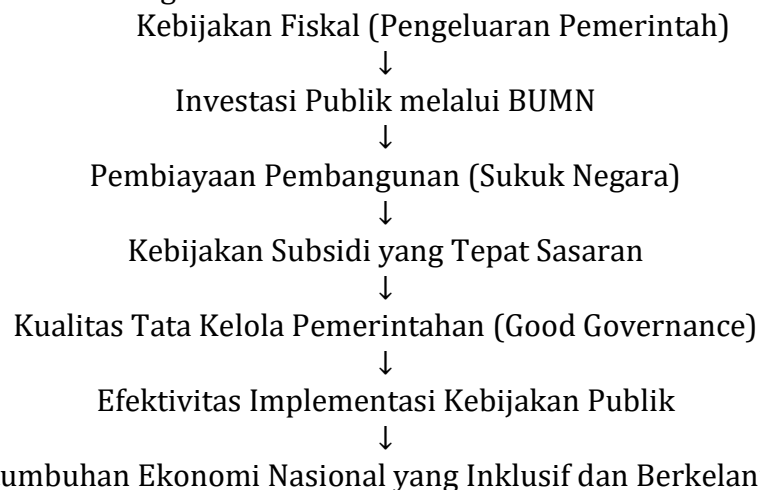
3. Kerangka Konseptual Penelitian

Kerangka konseptual penelitian ini disusun berdasarkan sintesis beberapa teori utama dalam ekonomi publik, yaitu Keynesian Theory, Endogenous Growth Theory, Public Finance Theory, dan Good Governance Theory. Keynesian Theory menjelaskan bahwa intervensi pemerintah melalui kebijakan fiskal, terutama pengeluaran pemerintah, berperan dalam meningkatkan permintaan agregat, menciptakan lapangan kerja, dan mendorong pertumbuhan ekonomi. Sementara itu, Endogenous Growth Theory menegaskan bahwa investasi publik pada infrastruktur, pendidikan, teknologi, dan inovasi mampu meningkatkan produktivitas serta mendorong pertumbuhan ekonomi dalam jangka panjang. Di sisi lain, Public Finance Theory menempatkan pemerintah sebagai aktor utama dalam mengalokasikan sumber daya publik secara efisien untuk mencapai kesejahteraan masyarakat, sedangkan Good Governance Theory menekankan pentingnya transparansi, akuntabilitas, efektivitas, efisiensi, partisipasi, dan kepastian hukum sebagai prasyarat keberhasilan implementasi kebijakan publik.

Berdasarkan landasan teoritis tersebut, penelitian ini memandang bahwa pertumbuhan ekonomi nasional merupakan hasil dari sinergi berbagai instrumen sektor publik yang saling melengkapi. Kebijakan fiskal diwujudkan melalui pengeluaran pemerintah yang diarahkan untuk meningkatkan permintaan agregat, memperluas penyediaan infrastruktur, meningkatkan kualitas pelayanan publik, serta mendorong pemerataan pembangunan (Amri et al., 2023). Selanjutnya, investasi publik melalui Badan Usaha Milik Negara (BUMN) berperan dalam memperkuat sektor-sektor strategis, meningkatkan produktivitas nasional, serta menciptakan kesempatan kerja yang lebih luas (Afonso & Rodrigues, 2024). Pemerintah juga memanfaatkan instrumen pembiayaan syariah, seperti sukuk negara, sebagai alternatif pembiayaan pembangunan yang mampu mendukung keberlanjutan fiskal sekaligus mempercepat pembangunan infrastruktur (Irianti et al., 2024; Metoui & Ghorbel, 2023). Selain itu, kebijakan subsidi yang tepat sasaran berfungsi menjaga daya beli masyarakat, mengurangi ketimpangan sosial, dan memperkuat stabilitas ekonomi, sehingga manfaat pembangunan dapat dirasakan secara lebih merata.

Dalam kerangka konseptual ini, kualitas tata kelola pemerintahan (*good governance*) diposisikan sebagai faktor integratif yang menentukan efektivitas seluruh instrumen sektor publik (Ramin, 2024). Tata kelola yang baik memastikan bahwa pengeluaran pemerintah, investasi publik, pembiayaan pembangunan, dan kebijakan subsidi dapat diimplementasikan secara transparan, akuntabel, efektif, dan efisien. Sebaliknya, lemahnya kualitas kelembagaan dan birokrasi berpotensi mengurangi efektivitas kebijakan serta menghambat pencapaian tujuan pembangunan (Nguyen, 2024; Okunlola et al., 2024; Sulemana & Mom, 2023). Oleh karena itu, penelitian ini memandang bahwa pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan tidak hanya ditentukan oleh besarnya intervensi pemerintah, tetapi juga oleh kemampuan pemerintah dalam mengintegrasikan berbagai instrumen sektor publik melalui tata kelola pemerintahan yang berkualitas.

Berdasarkan sintesis tersebut, penelitian ini memandang bahwa hubungan antar konsep dapat dijelaskan sebagai berikut:



Kerangka konseptual ini menunjukkan bahwa setiap instrumen sektor publik tidak bekerja secara terpisah, melainkan saling melengkapi dalam membentuk sistem kebijakan pembangunan. Kualitas tata kelola pemerintahan menjadi faktor integratif yang menentukan keberhasilan implementasi seluruh instrumen sektor publik dalam menghasilkan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kepustakaan (*library research*), yaitu penelitian yang memanfaatkan data sekunder sebagai sumber utama dalam menjawab rumusan masalah. Pendekatan ini dipilih karena penelitian bertujuan menganalisis, membandingkan, dan mensintesis berbagai teori serta temuan empiris mengenai peran sektor publik dalam mendorong pertumbuhan perekonomian nasional. Menurut John W. Creswell dan J. David Creswell (2023), pendekatan kualitatif bertujuan memahami fenomena melalui interpretasi terhadap berbagai sumber data secara mendalam, sedangkan studi kepustakaan memungkinkan peneliti memperoleh pemahaman yang komprehensif melalui analisis kritis terhadap literatur yang relevan.

Sumber data penelitian terdiri atas artikel jurnal nasional dan internasional bereputasi, buku akademik, prosiding ilmiah, regulasi pemerintah, laporan resmi lembaga nasional maupun internasional, serta dokumen kebijakan yang berkaitan dengan sektor publik, kebijakan fiskal, pengeluaran pemerintah, investasi publik, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), pembiayaan syariah (*sukuk*), tata kelola pemerintahan (*good governance*), dan

pertumbuhan ekonomi. Penelusuran literatur dilakukan melalui basis data Scopus, Web of Science, ScienceDirect, SpringerLink, Google Scholar, dan Garuda dengan menggunakan kata kunci *public sector*, *public expenditure*, *fiscal policy*, *public investment*, *state-owned enterprises*, *good governance*, *economic growth*, *Islamic public finance*, dan *sukuk*. Penelusuran literatur yang sistematis diperlukan agar sumber yang diperoleh memiliki kualitas, relevansi, dan kredibilitas yang tinggi dalam mendukung tujuan penelitian (Snyder, 2019).

Pemilihan literatur dilakukan menggunakan kriteria inklusi dan eksklusi untuk memastikan kualitas sumber yang dianalisis. Kriteria inklusi meliputi: (1) artikel yang membahas sektor publik, kebijakan fiskal, investasi publik, pembiayaan pembangunan, tata kelola pemerintahan, atau pertumbuhan ekonomi; (2) dipublikasikan dalam jurnal ilmiah bereputasi, buku akademik, atau dokumen resmi; (3) tersedia dalam bentuk *full text*; dan (4) memiliki relevansi langsung dengan tujuan penelitian. Adapun kriteria eksklusi meliputi publikasi yang tidak melalui proses *peer review*, artikel yang substansinya tidak sesuai dengan fokus penelitian, dokumen yang duplikatif, serta sumber yang tidak memiliki kredibilitas akademik.

Proses seleksi literatur dilakukan melalui tahapan identifikasi, penyaringan (*screening*), penilaian kelayakan (*eligibility*), dan penetapan literatur yang dianalisis (*included studies*). Tahapan ini mengacu pada pedoman PRISMA 2020 yang dikembangkan oleh Page et al. (2021), sehingga proses seleksi literatur menjadi lebih sistematis, transparan, dan mudah direplikasi oleh peneliti lain.

Analisis data dilakukan menggunakan teknik analisis isi (*content analysis*) yang dipadukan dengan sintesis literatur. Menurut Klaus Krippendorff (2019), *content analysis* merupakan teknik analisis yang digunakan untuk mengidentifikasi, mengelompokkan, dan menginterpretasikan makna suatu teks secara sistematis dan objektif. Tahapan analisis dalam penelitian ini meliputi: (1) reduksi data; (2) kategorisasi berdasarkan tema penelitian; (3) analisis dan sintesis terhadap teori serta hasil penelitian empiris; dan (4) penarikan kesimpulan untuk merumuskan proposisi konseptual mengenai peran sektor publik dalam mendorong pertumbuhan ekonomi nasional.

Keabsahan data dijaga melalui teknik triangulasi sumber, yaitu membandingkan informasi yang diperoleh dari berbagai jurnal ilmiah, buku akademik, regulasi, serta laporan resmi lembaga nasional maupun internasional. Teknik triangulasi bertujuan meningkatkan kredibilitas dan validitas hasil penelitian melalui perbandingan berbagai sumber data (Norman K. Denzin, 2017). Selain itu, interpretasi hasil dilakukan dengan menggunakan perspektif *Keynesian Theory*, *Endogenous Growth Theory*, *Public Finance Theory*, dan *Good Governance Theory* sebagai landasan dalam mensintesis berbagai temuan penelitian sehingga diperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai kontribusi sektor publik terhadap pertumbuhan ekonomi nasional.

Hasil Penelitian

Berdasarkan sintesis dan analisis mendalam terhadap berbagai literatur yang mencakup spektrum kebijakan fiskal, manajemen sektor publik, serta dinamika ekonomi pembangunan, ditemukan bahwa peran sektor publik dalam mendorong pertumbuhan ekonomi nasional merupakan entitas yang krusial dan tidak dapat dipisahkan dari efektivitas instrumen kebijakan yang diimplementasikan. Dalam lanskap ekonomi modern yang penuh dengan ketidakpastian, sektor publik tidak lagi sekadar dipandang sebagai entitas pasif yang hanya bertugas mengelola administrasi rutin, melainkan harus bertransformasi menjadi mesin penggerak utama yang memiliki otoritas strategis untuk mengarahkan alokasi sumber daya negara demi tercapainya target pembangunan yang inklusif, merata, dan berkelanjutan.

ketergantungan pertumbuhan ekonomi pada kebijakan sektor publik menegaskan bahwa setiap rupiah yang dikeluarkan oleh pemerintah membawa implikasi luas terhadap stabilitas ekonomi nasional. Namun, efektivitas peran tersebut sangat bergantung pada bagaimana pemerintah mampu menerjemahkan kebijakan teoretis yang kompleks menjadi tindakan nyata yang responsif, tepat sasaran, dan adaptif terhadap kebutuhan ekonomi masyarakat. Sektor publik memiliki tanggung jawab moral dan struktural untuk menjembatani kesenjangan antara kapasitas produktif nasional dengan tuntutan kesejahteraan sosial, yang sering kali tidak mampu diselesaikan oleh mekanisme pasar murni.

Dalam konteks penelitian ini, temuan-temuan dari berbagai literatur mengidentifikasi bahwa terdapat tiga pilar utama yang menjadi determinan mutlak bagi keberhasilan sektor publik dalam memacu pertumbuhan ekonomi nasional. Pilar-pilar tersebut tidak bekerja secara terisolasi, melainkan saling berinteraksi dalam sebuah ekosistem kebijakan yang integral dan kompleks. Masing-masing pilar ini menuntut pendekatan strategis yang tidak hanya berorientasi pada efisiensi teknokratis semata, tetapi juga harus berlandaskan pada prinsip kemaslahatan publik yang luas. Dalam perspektif penulis, esensi dari setiap kebijakan sektor publik seharusnya bukan sekadar mengejar angka pertumbuhan statistik melalui alokasi anggaran, melainkan bagaimana menciptakan stabilitas yang mampu melindungi kelompok rentan, meningkatkan daya saing bangsa, dan menjamin keberlanjutan sumber daya untuk generasi mendatang. Dengan memadukan antara kekuatan instrumen kebijakan yang presisi dan filosofi pembangunan yang berpihak pada kesejahteraan bersama, sektor publik diharapkan mampu menjadi jangkar bagi ketahanan ekonomi nasional di tengah gejolak dinamika global. Oleh karena itu, identifikasi terhadap determinan-determinan ini menjadi krusial untuk memetakan bagaimana sinergi kebijakan dapat dioptimalkan dalam jangka panjang. Analisis berikut akan menguraikan secara mendalam bagaimana ketiga pilar tersebut beroperasi sebagai motor penggerak transformasi ekonomi yang berorientasi pada keadilan sosial dan produktivitas nasional

1. Efektivitas Pengeluaran Pemerintah Dan Investasi Negara.

Hasil sintesis berbagai penelitian menunjukkan bahwa pengeluaran pemerintah merupakan salah satu instrumen fiskal yang memiliki pengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Amri et al. (2023) menemukan bahwa efektivitas pengeluaran pemerintah dalam mendorong pertumbuhan ekonomi dipengaruhi oleh kapasitas fiskal daerah dan optimalisasi penerimaan pajak. Temuan tersebut sejalan dengan Okunlola et al. (2024), yang menunjukkan bahwa dampak positif pengeluaran pemerintah terhadap pertumbuhan ekonomi akan semakin besar apabila didukung oleh kualitas tata kelola pemerintahan yang baik, rendahnya tingkat korupsi, dan stabilitas kelembagaan. Dengan demikian, efektivitas pengeluaran pemerintah tidak hanya ditentukan oleh besarnya alokasi anggaran, tetapi juga oleh kualitas implementasi kebijakan publik (Handini et al., 2025).

Secara konseptual, pengeluaran pemerintah berfungsi sebagai instrumen stabilisasi ekonomi melalui peningkatan permintaan agregat, penyediaan infrastruktur, penguatan pelayanan publik, serta penciptaan lapangan kerja. Dalam kondisi perlambatan ekonomi atau ketika investasi swasta belum berkembang secara optimal, belanja pemerintah berperan sebagai stimulus fiskal yang mampu mempertahankan aktivitas ekonomi dan meningkatkan produktivitas nasional. Oleh karena itu, kualitas belanja pemerintah perlu diarahkan pada program-program yang memiliki efek pengganda (*multiplier effect*) tinggi sehingga mampu menciptakan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

Selain pengeluaran pemerintah, investasi negara melalui mekanisme Penyertaan Modal Negara (PMN) juga memiliki peran strategis dalam mendukung pembangunan ekonomi. Afonso dan Rodrigues (2024) menjelaskan bahwa investasi publik pada sektor produktif, terutama infrastruktur dan penelitian serta pengembangan (*research and development*), mampu meningkatkan produktivitas dan memperkuat pertumbuhan ekonomi dalam jangka panjang. Investasi pemerintah tidak hanya meningkatkan kapasitas produksi nasional, tetapi juga mendorong partisipasi investasi swasta melalui perbaikan infrastruktur dan iklim usaha yang lebih kondusif (Sihombing et al., 2025).

Dalam konteks Indonesia, PMN merupakan instrumen kebijakan yang memperkuat peran Badan Usaha Milik Negara (BUMN) sebagai pelaku utama pembangunan nasional. Keberhasilan PMN tidak semata-mata diukur dari peningkatan profitabilitas perusahaan, tetapi juga dari kemampuan BUMN menjalankan fungsi pembangunan (*development function*) melalui penyediaan infrastruktur, pemerataan akses energi, penguatan konektivitas logistik, serta penyediaan layanan publik yang belum sepenuhnya dapat dipenuhi oleh sektor swasta. Dengan demikian, BUMN memiliki peran ganda, yaitu sebagai entitas bisnis yang menghasilkan nilai ekonomi sekaligus sebagai agen pembangunan yang mendukung pemerataan kesejahteraan masyarakat (Agus Baskara, 2025).

Hasil sintesis literatur menunjukkan bahwa pengeluaran pemerintah dan investasi negara memiliki hubungan yang saling melengkapi dalam mendorong pertumbuhan ekonomi. Pengeluaran pemerintah berfungsi menjaga stabilitas ekonomi dalam jangka pendek, sedangkan investasi publik menghasilkan peningkatan kapasitas produksi dan produktivitas dalam jangka panjang. Namun, efektivitas kedua instrumen tersebut sangat bergantung pada kualitas tata kelola pemerintahan, efisiensi alokasi anggaran, serta kemampuan pemerintah dalam menetapkan prioritas pembangunan. Oleh karena itu, kebijakan fiskal perlu diarahkan pada belanja yang produktif dan investasi publik yang memiliki dampak ekonomi tinggi agar mampu menciptakan pertumbuhan ekonomi yang inklusif, berkelanjutan, dan berdaya saing.

2. Diversifikasi Instrumen Pembiayaan Dan Kebijakan Subsidi

Hasil sintesis berbagai penelitian menunjukkan bahwa diversifikasi instrumen pembiayaan merupakan salah satu strategi penting dalam memperkuat kapasitas fiskal pemerintah tanpa meningkatkan ketergantungan terhadap pembiayaan konvensional. Dalam konteks ekonomi syariah, sukuk negara telah berkembang menjadi instrumen pembiayaan yang efektif untuk mendukung pembangunan infrastruktur sekaligus memperluas sumber pembiayaan pemerintah. Maharani dan Widyastuti (2024) menunjukkan bahwa sukuk memberikan kontribusi positif terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia melalui peningkatan kapasitas pembiayaan pembangunan. Temuan tersebut diperkuat oleh Irianti et al. (2024) yang menyatakan bahwa penerbitan Sukuk Negara berperan dalam pembiayaan defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) serta mendukung pertumbuhan ekonomi, terutama ketika didukung oleh tingkat likuiditas pasar yang memadai. Selain itu, Metoui dan Ghorbel (2023) menemukan bahwa perkembangan pasar sukuk memiliki hubungan positif dengan pertumbuhan ekonomi di beberapa negara berkembang karena mampu menghubungkan sektor keuangan dengan aktivitas ekonomi riil.

Secara konseptual, sukuk memiliki karakteristik yang berbeda dengan instrumen utang konvensional karena didasarkan pada kepemilikan aset (*underlying asset*) dan prinsip bagi hasil sesuai syariah. Karakteristik tersebut menjadikan sukuk tidak hanya sebagai alternatif pembiayaan pemerintah, tetapi juga sebagai instrumen yang mendorong

investasi pada sektor-sektor produktif sehingga mampu memperkuat stabilitas fiskal dan mendukung pembangunan ekonomi yang berkelanjutan. Dengan demikian, diversifikasi pembiayaan melalui sukuk dapat mengurangi ketergantungan pemerintah terhadap pembiayaan berbasis utang konvensional sekaligus memperluas partisipasi investor dalam pembiayaan pembangunan nasional.

Selain pembiayaan pembangunan, kebijakan subsidi juga merupakan instrumen penting dalam sektor publik yang bertujuan menjaga daya beli masyarakat, mengurangi ketimpangan sosial, dan meningkatkan akses masyarakat terhadap kebutuhan dasar. Namun demikian, efektivitas kebijakan subsidi sangat bergantung pada ketepatan sasaran penerima, efisiensi distribusi, serta kemampuan pemerintah dalam mengendalikan beban fiskal. Subsidi yang tidak tepat sasaran berpotensi menimbulkan inefisiensi anggaran, meningkatkan beban fiskal, serta mengurangi ruang fiskal pemerintah untuk membiayai sektor-sektor produktif lainnya.

Hasil sintesis literatur menunjukkan bahwa kebijakan subsidi perlu diarahkan pada pendekatan yang lebih adaptif dan berbasis data agar manfaatnya dapat diterima oleh kelompok masyarakat yang benar-benar membutuhkan. Digitalisasi sistem pendataan, integrasi basis data penerima manfaat, serta penguatan mekanisme pengawasan menjadi faktor penting dalam meningkatkan efektivitas implementasi kebijakan subsidi. Di samping itu, kebijakan subsidi sebaiknya tidak hanya berorientasi pada pemberian bantuan konsumtif, tetapi juga diintegrasikan dengan program pemberdayaan ekonomi, seperti akses pembiayaan usaha, pelatihan keterampilan, dan pengembangan kewirausahaan. Pendekatan tersebut diharapkan mampu meningkatkan kemandirian ekonomi masyarakat sekaligus mengurangi ketergantungan terhadap bantuan pemerintah dalam jangka panjang.

Berdasarkan hasil sintesis tersebut, diversifikasi instrumen pembiayaan melalui sukuk dan reformasi kebijakan subsidi merupakan dua strategi yang saling melengkapi dalam memperkuat peran sektor publik. Sukuk berfungsi memperluas kapasitas pembiayaan pembangunan tanpa membebani fiskal secara berlebihan, sedangkan subsidi yang tepat sasaran mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan menjaga stabilitas sosial. Oleh karena itu, keberhasilan kedua instrumen tersebut sangat bergantung pada kualitas tata kelola pemerintahan, efektivitas implementasi kebijakan, serta kemampuan pemerintah dalam menciptakan sinergi antara pembangunan ekonomi, keberlanjutan fiskal, dan pemerataan kesejahteraan masyarakat.

3. Tata Kelola Dan Keberlanjutan Kebijakan

Temuan literatur secara konsisten menegaskan bahwa instrumen kebijakan secanggih apa pun tidak akan mampu menjamin pertumbuhan yang stabil tanpa ditopang oleh fondasi tata kelola yang kokoh dan berintegritas (Amalina, 2024). Kualitas tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel bukanlah sekadar pelengkap, melainkan variabel penentu yang memoderasi efektivitas setiap kebijakan fiskal maupun investasi (Bakhri, 2023). Dalam konteks ini, saya berpendapat bahwa tata kelola adalah "*ruh*" dari setiap kebijakan publik; ia adalah sistem saraf yang memastikan setiap perintah kebijakan diterjemahkan menjadi aksi nyata di lapangan tanpa terdistorsi oleh kepentingan sektoral atau praktik rente. Tanpa transparansi yang ketat, setiap instrumen fiskal berisiko tinggi mengalami kebocoran anggaran yang bukan hanya menghambat pencapaian tujuan ekonomi, tetapi juga mengikis kepercayaan publik (*public trust*) terhadap negara (Rismanto, 2024).

Tuntutan akan reformasi ekonomi di tengah era globalisasi mengharuskan adanya adaptasi radikal dalam birokrasi dan pendidikan manajemen sektor publik (Arifa et al., 2025). Pemerintah dituntut untuk meninggalkan pola-pola birokrasi yang kaku dan lamban, serta beralih menuju manajemen publik yang lebih responsif, lincah (*agile*), dan mampu membaca perubahan lingkungan ekonomi yang semakin volatil (Dalimunthe & Lubis, 2023). Menurut pandangan saya, tantangan terbesar bagi birokrasi saat ini adalah kemampuan untuk menyeimbangkan antara ketaatan pada prosedur administratif (*compliance*) dengan kecepatan dalam pengambilan keputusan strategis (*decisiveness*) (Furqon & Ramadhan, 2026).

Oleh karena itu, penguatan tata kelola menuntut adanya sinkronisasi antara integritas moral yang tinggi dan kompetensi manajerial yang mumpuni bagi para pengambil kebijakan (Lopez et al., 2026). Pembangunan tidak boleh lagi dipahami sebagai upaya sempit untuk mengejar angka pertumbuhan statistik dalam laporan tahunan, melainkan sebuah transformasi struktural yang harus berdampak nyata pada kesejahteraan masyarakat secara luas. Hal ini mencakup reformasi sistem remunerasi, digitalisasi layanan publik untuk meminimalisir interaksi koruptif, serta komitmen penuh pada pengawasan berbasis hasil (*outcome based monitoring*) (Fathoni, 2020). Dengan menempatkan tata kelola sebagai prioritas tertinggi, sektor publik akan memiliki daya tahan (*resilience*) yang lebih baik dalam menghadapi guncangan eksternal, sekaligus memastikan bahwa setiap kebijakan yang diambil benar-benar mampu membawa perubahan struktural bagi kualitas hidup masyarakat jangka panjang (Seran et al., 2025).

Temuan-temuan dalam penelitian ini menunjukkan adanya irisan yang kuat antara instrumen kebijakan sektor publik dengan performa pertumbuhan ekonomi nasional. Secara teoritis, hasil penelitian ini memperkuat proposisi bahwa sektor publik bukan sekadar entitas penyedia barang publik, melainkan aktor sentral dalam menstabilkan ekonomi di tengah ketidakpastian pasar. Jika dikaitkan dengan literatur yang ada, efektivitas pengeluaran pemerintah yang ditemukan dalam penelitian ini selaras dengan pandangan ekonomi pembangunan yang menyatakan bahwa *government spending* memiliki efek pengganda (*multiplier effect*) yang luas jika disalurkan ke sektor-sektor produktif.

Namun, terdapat poin krusial yang menjadi catatan dalam penelitian ini, yakni ketergantungan signifikansi kebijakan terhadap variabel tata kelola. Berbeda dengan pandangan ekonomi klasik yang seringkali hanya berfokus pada volume intervensi pemerintah, temuan ini menegaskan bahwa "kualitas" tata kelola adalah *critical success factor*. Tanpa akuntabilitas, instrumen kebijakan seperti subsidi atau investasi negara justru berpotensi menciptakan inefisiensi yang justru membebani keuangan negara. Hal ini mengonfirmasi bahwa reformasi birokrasi dan integritas pengambil kebijakan menjadi "kunci pembuka" agar instrumen fiskal dapat diterjemahkan menjadi kesejahteraan riil (Janah, 2024).

Secara spesifik, pergeseran paradigma pembiayaan melalui sukuk yang ditemukan dalam penelitian ini memberikan perspektif baru bahwa instrumen syariah mampu menjadi solusi atas keterbatasan pembiayaan pembangunan. Ini membuktikan bahwa integrasi antara prinsip etis ekonomi syariah dengan kebutuhan ekonomi makro dapat menciptakan sistem yang lebih resilien dan berkeadilan. Dengan demikian, diskusi ini menunjukkan bahwa keberhasilan pembangunan ekonomi nasional merupakan hasil dari orkestrasi yang matang antara kecanggihan instrumen kebijakan, keberanian dalam

melakukan inovasi pembiayaan, serta komitmen kuat terhadap tata kelola pemerintahan yang bersih dan berorientasi pada kemaslahatan masyarakat.

Kesimpulan

Penelitian ini menyimpulkan bahwa sektor publik memiliki peran yang sangat strategis dalam mendorong pertumbuhan perekonomian nasional melalui implementasi kebijakan fiskal, pengeluaran pemerintah, investasi publik, penguatan peran Badan Usaha Milik Negara (BUMN), pemanfaatan instrumen pembiayaan syariah seperti sukuk, serta kebijakan subsidi yang tepat sasaran. Namun, efektivitas berbagai instrumen tersebut tidak hanya ditentukan oleh besarnya alokasi anggaran, melainkan sangat dipengaruhi oleh kualitas tata kelola pemerintahan yang mencakup transparansi, akuntabilitas, efektivitas, dan efisiensi dalam pengelolaan sumber daya publik. Dengan demikian, sinergi antar-instrumen kebijakan publik yang didukung oleh penerapan prinsip *good governance* menjadi faktor utama dalam mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif, berkelanjutan, dan berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Secara teoretis, penelitian ini memberikan kontribusi terhadap pengembangan kajian ekonomi sektor publik dengan menyajikan sintesis yang mengintegrasikan berbagai instrumen kebijakan publik dalam satu kerangka konseptual yang komprehensif. Pendekatan ini menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi tidak hanya dipengaruhi oleh satu instrumen kebijakan, tetapi merupakan hasil interaksi antara kebijakan fiskal, investasi publik, pembiayaan pembangunan, dan kualitas tata kelola pemerintahan. Temuan ini memperkaya literatur mengenai ekonomi publik sekaligus menegaskan pentingnya pendekatan yang lebih terintegrasi dalam perumusan kebijakan pembangunan.

Penelitian ini memiliki keterbatasan karena menggunakan metode studi kepustakaan (*library research*) yang sepenuhnya bergantung pada data sekunder, sehingga belum mampu mengukur secara empiris besarnya pengaruh masing-masing instrumen sektor publik terhadap pertumbuhan ekonomi. Selain itu, hasil penelitian sangat dipengaruhi oleh cakupan dan karakteristik literatur yang dianalisis.

Oleh karena itu, penelitian selanjutnya disarankan menggunakan pendekatan empiris, baik kuantitatif, kualitatif maupun *mixed methods*, untuk menguji hubungan antara instrumen sektor publik dan pertumbuhan ekonomi pada tingkat nasional maupun daerah. Kajian mendatang juga perlu mengkaji efektivitas kebijakan sektor publik dalam menghadapi transformasi digital, penguatan ekonomi hijau (*green economy*), transisi energi, serta implementasi pembiayaan berkelanjutan (*sustainable finance*) sebagai strategi pembangunan ekonomi yang adaptif terhadap tantangan global.

Daftar Pustaka

- Agus Baskara. (2025). PERAN STRATEGIS PENDIDIKAN DAN KESEHATAN DALAM MENDORONG PERTUMBUHAN EKONOMI YANG INKLUSIF DAN BERKELANJUTAN. *Educatus*, 3(1), 44–49. <https://doi.org/10.69914/educatus.v3i1.34>
- Amalina, A. (n.d.). *Peran UMKM (Usaha Mikro, Kecil, Menengah) Dalam Perekonomian Nasional*.
- Anisa, S. N., Aulia, S., Indah, A., Dipa, M. A. K., & Panorama, M. (2024). Analisis Peran Infrastruktur Dalam Pertumbuhan Ekonomi Pembangunan Di Kota Palembang. *Jurnal Publikasi Ekonomi dan Akuntansi*, 4(1), 36–54. <https://doi.org/10.51903/jupea.v4i1.2435>
- Arifa, I., Choiri, A., Wibowo, W., & Panggabean, N. A. (2025). *Peran UMKM dalam Meningkatkan Perekonomian Nasional*.
- Bakhri, S. (2025). *Peran Investasi Asing dalam Mendorong Kompleksitas Ekonomi*.

- Dalimunthe, N., & Lubis, N. K. (2023). *PERAN LEMBAGA PERBANKAN TERHADAP PEMBANGUNAN EKONOMI: FUNGSI DAN TUJUANNYA DALAM MENYOKONG KETENAGAKERJAAN*. 8(3).
- Fathoni, H. (2020). PERAN PASAR MODAL SYARIAH DALAM LAJU PERTUMBUHAN EKONOMI DI INDONESIA. *Khazanah Multidisiplin*, 2(1), 33–44. <https://doi.org/10.15575/km.v2i1.11635>
- Fitri, D. S., Faozan, R. G., Nurkhasanah, S., & Noviarita, H. (n.d.). *PENGARUH PENGEMBANGAN SEKTOR INDUSTRI TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI DI INDONESIA*.
- Fitri Nurul Aftitah, Jacinda Labana. K, Kamaliatun Hasanah, & Nur Lailatul Hadi. F. M. (2024). Pengaruh Umkm Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Indonesia Pada Tahun 2023. *Jurnal Kajian dan Penalaran Ilmu Manajemen*, 3(1), 32–43. <https://doi.org/10.59031/jkpim.v3i1.511>
- Furqon, I. K., & Ramadhan, M. Z. (2026). PERAN PAJAK DALAM MENDORONG PERTUMBUHAN EKONOMI NASIONAL. *Journal of Economics and Business*, 01.
- Handini, N., Mely Darwina, Yudistira, & Wahjoe Pangestoeti. (2025). PERAN PEMERINTAH DAERAH DALAM MENGOPTIMALKAN POTENSI EKONOMI LOKAL MELALUI INOVASI KEBIJAKAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN. *JURNAL ILMIAH NUSANTARA*, 2(5), 964–986. <https://doi.org/10.61722/jinu.v2i5.5793>
- Janah, U. R. N. (2024). *Peran Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dalam Pertumbuhan Ekonomi: Analisis Kontribusi Sektor UMKM terhadap Pendapatan Nasional di Indonesia*.
- Jannah, M., & Kurniati, E. (2025). ANALISIS PERAN PEMERINTAH DAERAH TERHADAP PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR SEBAGAI UPAYA MENDORONG PERTUMBUHAN EKONOMI DI PROVINSI LAMPUNG. *Jurnal Ilmu Ekonomi*, 4(1), 231–251. <https://doi.org/10.59827/jie.v4i1.220>
- Kharisma, B. (2014). *Good Governance Sebagai Suatu Konsep dan Mengapa Penting dalam Sektor Publik dan Swasta: Suatu Pendekatan Ekonomi Kelembagaan*.
- Lopez, I. M. D., Ndak, M. P., & Pamut, M. C. (2026). Peran Pajak Penghasilan Dalam Mendorong Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia. *Jurnal Bisnis dan Manajemen*, 4(1).
- Mi'ah, M., Tarmidzi Anas, A., Riskiyah, R., Munaiyah, M., Sa'diyah, Q., Aini, W., & Anggun, A. (2024). PERAN BURSA EFEK DALAM MENDORONG PERTUMBUHAN EKONOMI NASIONAL. *Prospeks: Prosiding Pengabdian Ekonomi dan Keuangan Syariah*, 3(1), 590–600. <https://doi.org/10.32806/ppsv3i1.317>
- Muhammad Angka Widjaya & Muhammad Iqbal Fasa. (2025). Analisis Peran E-commerce dalam Mendorong Pertumbuhan Ekonomi Digital di Indonesia. *Jurnal Bersama Ilmu Ekonomi (EKONOM)*, 1(2), 96–102. <https://doi.org/10.55123/ekonom.v1i2.60>
- Putra, S. K., Wahyu Setiani, Dinda Astuti, & Wahjoe Pangestoeti. (2025). Analisis Peran Pemerintah dalam Perekonomian Nasional melalui Tiga Fungsi Utama Fiskal: Alokasi, Distribusi, dan Stabilitas. *JURNAL ILMIAH EKONOMI DAN MANAJEMEN*, 3(6), 408–416. <https://doi.org/10.61722/jiem.v3i6.5380>
- Ramin, Moh. (2024). DAMPAK PERUBAHAN DEMOGRAFIS TAHUN 2024 TERHADAP DINAMIKA EKONOMI GLOBAL. *CURRENCY: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah*, 3(1), 389–404. <https://doi.org/10.32806/ccy.v3i1.330>
- Rismanto, R. (2024). PERAN INVESTASI PADA ENERGI TERBARUKAN DALAM MENDORONG PERTUMBUHAN EKONOMI BERKELANJUTAN DI ERA NET-ZERO EMISSIONS. *CURRENCY: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah*, 3(1), 343–361. <https://doi.org/10.32806/ccy.v3i1.329>

- Sari, D. M., & Rejekiingsih, T. W. (2024). Pengaruh Pengeluaran Sektor Publik Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Negara ASEAN. *Al Qalam: Jurnal Ilmiah Keagamaan dan Kemasyarakatan*, 18(4), 2628. <https://doi.org/10.35931/aq.v18i4.3571>
- Seran, S. R., Gomes, P. M. S., Bria, J. I., Piri, M. S., & Dima, E. T. Y. (2025). *Peran Pemerintah bagi Pertumbuhan Ekonomi Indonesia*. 8(3).
- Setyawan, R. V., & Purnomo, Y. F. P. (2025). *Analisis Peran Pasar Modal dalam Mendorong Pertumbuhan Ekonomi Nasional: Studi Kualitatif pada Bursa Efek Indonesia*.
- Sihombing, A. H., Tarigan, Y. A., & Zein, A. W. (n.d.). *Peran Sektor Publik Dalam Pengembangan Ekonomi Berkelanjutan Universitas Islam Negeri Sumatera Utara*.
- Sukma, C. A., & Furqon, I. K. (2025). *KOLABORASI STRATEGIS: PERAN PUBLIK DAN SWASTA DALAM MENDORONG PERTUMBUHAN EKONOMI*. 5.
- Wijaya, R. H. (2021). *INVESTASI SYARIAH DAN PERTUMBUHAN EKONOMI: OPTIMASI PERAN SUKUK SEBAGAI PENUNJANG PEMBANGUNAN EKONOMI NASIONAL*. 6(1).